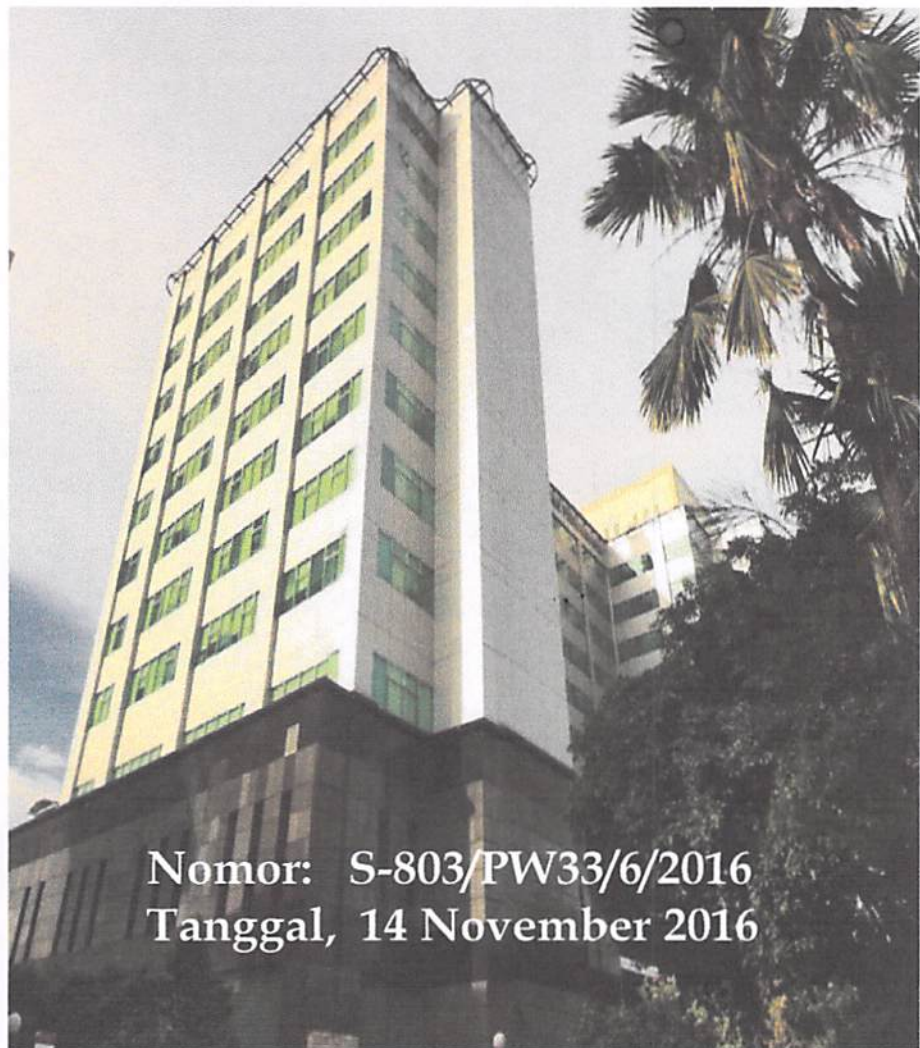




BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DAN TRIWULANAN PERWAKILAN MALUKU UTARA

TAHUN 2016 (REVISI)



Nomor: S-803/PW33/6/2016
Tanggal, 14 November 2016



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA
Jl.Makugawene, Kalumata, Ternate
Telp.(0921)3110294, Fax 3110176, e-mail: maluku.utara@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (Revisi)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Khaira Jaya
Jabatan : Kepala Perwakilan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardan Adiperdana
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Jakarta, 14 November 2016
Pihak Pertama,

Indra Khaira Jaya
NIP 19681231 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (Revisi)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	45
	2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100
	3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	60
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi	4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)	%	100
	5. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)	%	10
	6. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	0
	7. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	0
	8. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	28
	9. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	10
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	10. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	0
	11. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	0
	12. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
	13. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	20
	14. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	0
	15. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	80
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	Rekomendasi	81
	2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	Rekomendasi	26
	3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	Rekomendasi	4
	4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	25
	5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	2
B. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	1. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)	skala	7
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	80
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal	2. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	unit	0
	3. Tersedianya alat pengolahan data BPKP	unit	1
	4. Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B	unit	44
	5. Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP	unit	25

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	6. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP	unit	0
	7. Tersedianya sarana prasarana BPKP	unit	0
	8. Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	m2	50

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp. 2.648.654.000,00
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP	Rp. 9.212.464.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp. 553.776.000,00
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp. 352.843.000,00
Jumlah	Rp. 12.767.737.000,00

Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Jakarta, 14 November 2016

Kepala Perwakilan,



Indra Khaira Jaya
NIP 19681231 199303 1001

PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2016 (Revisi)
PERWAKILIAN BPKP MALUKU UTARA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target			
	1	2		3	4	5	6
A. Sasaran Program	1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara	Indikator Kinerja Program	1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern	10	20	30	45
			2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	25	50	75	100
			3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasiian kepada aparat penegak hukum	0	20	40	60
			4. Maturitas SPP Pemerintah Propinsi (level 1)	0	0	100	100
			5. Maturitas SPP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	0	10	10	10
			6. Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	0	0	0	0
			7. Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjaanya berpredikat minimal A (baik *)	0	0	0	0
			8. Persentase BUMD yang kinerjaanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	0	28	28	28
			9. Persentase BLUD yang kinerjaanya minimal baik dari BLUD yang dibina	0	10	10	10
			10. Kapabilitas APP Pemerintah Provinsi (Level 3)	0	0	0	0
B. Sasaran Program	1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwalian BPKP	Indikator Kinerja Kegiatan	11. Kapabilitas APP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	0	0	0	0
			12. Kapabilitas APP Pemerintah Provinsi (Level 2)	0	0	100	100
			13. Kapabilitas APP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	0	0	20	20
			14. Kapabilitas APP Pemerintah Provinsi (Level 1)	0	0	0	0
			15. Kapabilitas APP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1)	20	40	60	80
			1. Rekomendasi Pengawasan Perwalian BPKP	20	21	21	19
			2. Rekomendasi Pengawasan Perwalian BPKP Nawactia	6	7	7	6
			3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawactia	1	1	1	1
			4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SIP	7	7	7	4
			5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	0	0	0	0
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	Indikator Kinerja Program	1. Tersepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)	skala				7
							7

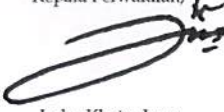
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan						
1. Tersedianya dukungan manajemen dan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Lap	20	20	20	20	80
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal	2. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	unit	0	0	0	0	0
	3. Tersedianya alat pengolahan data BPKP	unit	0	0	0	1	1
	4. Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B	unit	0	0	0	44	44
	5. Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP	unit	0	0	0	25	25
	6. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP	unit	0	0	0	0	0
	7. Tersedianya sarana prasarana BPKP	unit	0	0	0	0	0
	8. Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	m2	0	50	0	0	50

1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp	400.000.000,00	689.475.000,00	859.950.000	699.229.000	2.648.654.000
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/ Tunjangan BPKP	Rp	1.863.776.000	1.963.776.000	2.632.368.000	2.752.544.000	9.212.464.000
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp	157.800.000	97.800.000	145.600.000	152.576.000	553.776.000
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp	50.000.000	100.000.000	0	202.843.000	352.843.000
Jumlah	Rp	2.471.576.000,00	2.851.051.000,00	3.637.918.000,00	3.807.192.000	12.767.737.000

Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Ternate, 14 November 2016

Kepala Perwakilan,

 Indra Khaira Jaya
 NIP. 19681231 199303 1 001